

BAB II  
KONDISI KERAJAAN NGAYOGYAKARTA  
PADA AWAL ABAD KE XIX

A. Situasi Politik

Pada pertengahan abad ke-18, kerajaan Mataram dibelah menjadi dua, yaitu kerajaan Surakarta dan kerajaan Yogyakarta, pembagian kerajaan menjadi dua itu merupakan hasil dari perjanjian Giyanti, perjanjian antara sunan Paku Buwono III bersama kompeni Belanda dengan Pangeran Mangkubumi. Tepatnya pada tanggal 13 februari 1755 di desa Giyanti.<sup>1)</sup> Sebagai raja Surakarta tetap Sunan Paku Buwono III, sedang raja Yogyakarta yang pertama adalah Pangeran Mangkubumi dengan gelar Sri Sultan Hamengku Buwono I.

Perjanjian itu diadakan atas prakarsa Belanda untuk mengakhiri pemberontakan Mangkubumi dan kawan-kawan, yang sudah berjalan selama kurang lebih delapan tahun.

Pemberontakan Mangkubumi itu berawal dari rasa ketidakpuasannya terhadap sikap kompeni yang selalu ikut campur didalam urusan pemerintahan kerajaan Mataram. Disamping itu juga disebabkan karena kekecewaannya menyaksikan jatuhnya beberapa daerah di wilayah Mataram ke tangan Belanda, sebagai imbalan atas

<sup>1)</sup> Panitia Peringatan Kota Yogyakarta 200 tahun, Kota Yogyakarta 200 Tahun, 7 oktober 1756 - 7 oktober 1956, Yogyakarta, Sub Panitia Penerbit, 1956, hlm. 12.

jasa-jasa mereka dalam membantu menyelesaikan konflik yang ada di kerajaan Mataram.

Makin lama pemberontakan Mangkubumi semakin luas pengaruhnya, sehingga kekuatan pasukannya pun bertambah kuat. Hal itu menyebabkan Belanda merasa kesulitan mematahkan pemberontakan tersebut. Sementara itu, pihak kerajaan Surakarta sudah tidak mampu lagi untuk membiayai perang.

Dengan segala daya upayanya, akhirnya Belanda berhasil membujuk Pangeran Mangkubumi untuk mengadakan perundingan perdamaian guna mengakhiri perang saudara yang akan berkepanjangan, jika tidak segera dihentikan.

Adapun pembagian daerah mancanegara dalam perjanjian Gianti adalah sebagai berikut :

Untuk Surakarta : Jagaraga, Panaraga, separo Pacitan, Kediri, Blitar dengan Sregat, Pace (Nganjuk), Wirasaba, Blera, Banyumas, Kaduwang.

Untuk Yogyakarta : Madiun, Magetan, Caruban, separo Pacitan, Kertasana, Kalangbret, Ngrawa (Tulungagung), Japan (Mojokerto), Jipang (Bojonegoro), Teras Karas (Ngawen), Sela, Warung (Kuwu Wirosari), Grobogan.<sup>2)</sup>

Secara garis besar, kerajaan atau kesultanan Yogyakarta terdiri dari :

1. Nagara (ibukota), yaitu Yogyakarta
2. Nagara Agung (daerah-daerah yang ada di sekitar kota kerajaan, meliputi ; Pajang, Bangwetan/Sukawati,

<sup>2</sup> Dr. Soekanto, Sekitar Yogyakarta 1755-1825 Perjanjian Giyanti-Perang Diponegoro, Mahabarata, Jakarta, 23.

Bagelen, Kedu, Bumi Gede, Semarang.

3. Mancanegara (daerah-daerah yang letaknya jauh dari kota kerajaan) daerahnya sebagaimana tersebut di atas.<sup>3)</sup>

Di Negara Agung terdapat pegawai-pegawai raja yang disebut lungguh-lungguh, sedang pada tiap - tiap wilayah mancanegara dipimpin oleh Bupati, yang disebut juga sebagai para tuan tanah raja.<sup>4)</sup>

Pada masa awal pemerintahan Sri Sultan Hamengku Buwana I, situasi masih belum aman, karena Raden Mas Said dan kawan-kawan masih tetap mengadakan perlawanan. Kali ini pasukan Mas Said melawan Surakarta dan Yogyakarta, Mas Said menganggap bahwa bersedianya Mangkubumi mengadakan perjanjian, perdamaian dengan Belanda, berarti dia telah melakukan kerjasama dengan Belanda yang sangat dibencinya.

Dua tahun kemudian, kekuatan Mas Said telah lemah dan dia menyerahkan diri kepada Sunan Paku Buwana III. Barulah setelah pemberontakan itu berhenti, situasi menjadi aman kembali sehingga pembangunan dapat dimulai.

Selama pemerintahan Sultan Hamengku Buwana I tidak terjadi pertikaian dengan pihak Belanda, karena mereka sangat menaruh hormat kepadanya. Sultan boleh

<sup>3</sup> Sagimun M.D., Pahlawan Dipanegara Berjuang, Bara api kemerdekaan nan tak kunjung padam, Gunung Agung, Jakarta, 1986, hlm. 17.

<sup>4</sup> Dr. Soekanto, Op. Cit., hlm. 21-22.

mengangkat atau memilih sendiri pegawai-pegawai kerajaan, baik yang berkedudukan di Nagara, Nagara Agung, maupun mancanegara. Kompeni berusaha untuk tidak menimbulkan perselisihan dengan Sultan, mengingat betapa besar pengaruhnya ketika ia melakukan pemberontakan pada masa dahulu, dan hampir saja dapat menumbangkan kekuasaan Belanda di Kerajaan Mataram. Pengalaman tersebut dijadikan pegangan yang kuat bagi Belanda untuk tidak menanam bibit-bibit permusuhan dengannya.

Kerja sama yang dijalin Sultan Hamengku Buwana I dengan Belanda, hanya terbatas pada kerja sama dibidang perdagangan. Perdagangan hasil-hasil pertanian dan sebagiannya memang dikuasai oleh Belanda, namun pembeliannya dengan harga yang memadai.

Dalam buku sekitar Yogyakarta 1755-1825, ditulis beberapa pendapat para gubernur Jendral Belanda yang bertugas di Jawa, tentang kepribadian dan sikap Sri Sultan Hamengku Buwana I dalam memegang tampuk pemerintahan maupun dalam hubungannya dengan kompeni Belanda. Dari semua pendapat itu disimpulkan, bahwa Sultan Hamengku Buwana I adalah seorang raja yang sangat teguh pendiriannya. Dia bersedia bekerja sama dengan Belanda sebatas tidak merugikan kerajaan dan rakyatnya. Disebutkan pula, ia tidak begitu penurut sebagaimana sunan Surakarta dalam menghadapi kompeni Belanda.<sup>5)</sup>

---

<sup>5</sup> Ibid, hlm. 18-35.

Begitu pula dengan Patih Danurejo I . beserta pejabat-pejabat keraton lainnya, pikiran dan sikap mereka sejalan dengan sultan. Dengan demikian, pada waktu itu kemakmuran dan kesejahteraan seluruh kerajaan dapat terjamin karena tidak ada pihak-pihak yang ingin mencari keuntungan sendiri untuk memperoleh jabatan yang lebih tinggi dalam pemerintahan.

Masa pemerintahan Hamengku Buwono I berakhir pada tahun 1792. Tepatnya pada tanggal 24 Maret 1792 dia meninggal dunia, dan sebagai gantinya Raden Mas sundoro dinobatkan menjadi raja oleh kompeni Belanda , dengan gelar Sri Sultan Hamengku Buwono II.<sup>6)</sup>

Sebelum Putera Mahkota dinobatkan menjadi Raja untuk sementara urusan pemerintahan dijalankan oleh Belanda, yang dipimpin oleh Gubernur Van Over Straten. Kesempatan itu dipergunakan sebaik-baiknya oleh Belanda untuk memulai menanamkan pengaruhnya didalam Keraton Yogyakarta.

Pada masa pemerintahan Hamengku Buwono II inilah yakni pada bulan Januari 1804, Mr. Helman Willem Daendels diangkat oleh pemerintahan Belanda menjadi Gubernur Jenderal untuk Indonesia.<sup>7)</sup>

Pergantian pemimpin itu membawa perubahan bagi kerajaan surakarta dan Yogyakarta. Daendels menghendaki agar pada pertemuan antara kerabat Keraton dengan

---

<sup>6</sup> Ibid., hlm. 46.

<sup>7</sup> Sagimun M.D., Op.Cit., hlm. 35.

kompeni Belanda, tempat duduk raja disamakan dengan kompeni. Sebelumnya tempat duduk raja lebih tinggi daripada Residen. Begitu pula cara penghormatan Residen kepada Sultan dengan cara berdiri atau mempersembahkan sirih atau minuman kepada Sultan harus dihapuskan. Dengan adanya perubahan peraturan tersebut, mulailah muncul rasa ketidaksenangan Sultan Hamengku Buwana II dengan pemimpin baru itu.

Sementara itu di dalam kerajaan terjadi kecacauan akibat penggantian pejabat-pejabat kerajaan yang kurang tepat. Sebagai pengganti Patih Danurejo I yang telah meninggal, diangkatlah cucunya Raden Tumenggung Mertanegara dengan gelar Patih Danurejo II. Jabatan Bupati Wedana ( yang mengepalai bupati-bupati di daerah Mancanegara ) diberikan kepada Raden Ranga Prawira - dirja III, dan jabatan wedana lebet diberikan kepada Raden Tumenggung Sumadiningrat. Ketiganya merupakan menantu Sultan Hamengku Buwana II.

Ternyata ketiga orang yang diberi kepercayaan menduduki jabatan penting itu tidak dapat dapat bekerja dengan baik. Ketiganya selalu berusaha mencari muka di depan Putera Mahkota dan dan Belanda untuk memperoleh keuntungan-keuntungan pribadi.

Patih Danurejo II tidak memiliki kepribadian sebagaimana kakeknya kakeknya yang anti penjajah itu. Dia malah mendukung semua program yang dicanangkan Kompeni Belanda untuk memperoleh keuntungan yang besar. Mengeta-

hui tabiat Danurejo II yang terlalu memihak kepada Belanda itu, Sultan segera memecatnya.<sup>8)</sup>

Pemecatan atas dirinya itu, oleh Danurejo segera dilaporkan pihak kompeni, disertai dengan berbagai laporan mengenai sikap Sultan yang menentang peraturan-peraturan baru yang dibuat oleh Daendels. Dilaporkan pula siapa-siapa yang bersekongkol dengan Sultan, diantaranya Pangeran Natakusuma dan Pangeran Natadiningrat.

Berdasarkan laporan Danurejo II itulah Daendels mengajukan tuntutan kepada Sri Sultan agar mengembalikan Danurejo kepada kedudukan semula, mengharuskan Sultan mentaati semua peraturan yang telah dibuat oleh pihak kompeni, dan supaya Pangeran Natakusuma dan Pangeran Natadiningrat diserahkan kepada Belanda sebagai tawanan.

Karena Sultan Hamengku Buwana II tidak mau memenuhi tuntutan itu, maka Daendels sendiri dengan membawa tentara yang kuat dan besar jumlahnya, datang ke Yogyakarta dan memaksa Sultan agar mau memenuhi tuntutannya.

Melihat ketidakseimbangan tentara kompeni dengan pasukan keraton itu, maka dengan sangat terpaksa Sultan bersedia memenuhi tuntutan Daendels. Bahkan Sultan dipaksa turun dari tahtanya, dan sebagai penggantian kompeni menobatkan putera mahkota dengan

---

<sup>8</sup> Dr. Soekanto, Op. Cit., hlm. 49-51

gelar Sri Sultan Hamengku Buwana III, terkenal pula dengan sebutan Sultan Raja. Sultan II masih diperkenankan tinggal di dalam istana, yang kemudian beliau dikenal dengan sebutan Sultan Sepuh.<sup>9)</sup>

Penurunan Sultan Hamengku Buwana II dari tahtanya melanggar adat kebiasaan kerajaan Mataram, dan merupakan suatu penghinaan yang besar terhadap seorang raja.

Tindakan Dandels yang lain adalah penghapusan uang pantai yang harus dibayar gubernur Belanda kepada kerajaan, memperkuat pertahanan angkatan laut terhadap kemungkinan serangan dari Inggris, menuntut kerugian ekspedisi kepada kerajaan, dan pembuatan jalan raya dari Anyer sampai Banyuwangi.<sup>10)</sup>

Untuk melaksanakan pembuatan jalan raya, diperlukan tenaga dan biaya yang sangat besar. Oleh karena itu, demi terlaksananya program tersebut, dikerahkan tenaga rakyat dengan cara paksa. Para penduduk pribumi waktunya banyak tersita untuk kerja paksa itu, sehingga kesempatan mereka untuk mengurus ekonomi keluarga sangat sedikit sekali. Selanjutnya untuk menutup biaya pembuatan jalan juga diambil dari rakyat, dengan menaikkan penyerahan wajib dari penghasilan mereka pada prosentasi yang lebih tinggi.

---

<sup>9</sup> Sagimun M.D., Op.Cit. hlm. 21

<sup>10</sup> Ibid, hlm, 38 ( Cet. 1960).



Pada tanggal 16 Mei 1811 diadakan serah jabatan yaitu Daendels digantikan oleh gubernur Jenderal J. W. Janssens. Pemerintahan Janssens tidak berlangsung lama kemudian berakhirlah pemerintahannya pada tanggal 18 september 1811. Pada tahun itu pula Inggris memerangi Belanda dan berhasil mengalahkannya, sehingga kekuasaan Belanda di Indonesia jatuh di tangan Inggris.<sup>11</sup>

Thomas Stamford Raffles, selaku pemimpin segera menugaskan wakilnya ke Yogyakarta untuk mengumumkan, bahkan segala peraturan yang dibuat oleh Belanda untuk Yogyakarta masih tetap berlaku pada pemerintahan Inggris. Residen yang ditugaskan untuk kerajaan Yogyakarta yaitu P. Engelhard.<sup>12)</sup>

Pernyataan Inggris itu tidak diindahkan oleh Sultan Sepuh. Kesempatan itu digunakan olehnya untuk mengambil alih tahta kerajaan dari tangan Sultan Hamengkubuwana III, dan dia segera memproklamasikan diri menjadi raja kembali.

Selanjutnya Sultan Sepuh mengadakan pembersihan terhadap pejabat-pejabat kerajaan yang dahulu ikut membantu kompeni Belanda memojokkan kedudukannya. Termasuk patih Danurejo II, singkirkan dan dibunuh, karena dialah yang dipandang sebagai biang keladi se-

---

<sup>11</sup> Noto Suroto, Kesultanan Yogyakarta, Departemen P dan K Direktorat Jenderal Kebudayaan Balai Kajian Sejarah, Yogyakarta, 1985-1986, hlm. 25.

<sup>12</sup> Drs. Suratmin, Sejarah Perlawanan Terhadap Imperialisme di Yogyakarta, 1983, hlm. 60-61.

gala kekacauan yang terjadi di keraton Yogyakarta, dan sebagai penggantinya dipilih Sindunegara.

Pada saat itu Residen untuk Yogyakarta diganti oleh Jenderal Crawfrut, karena Jenderal Engelhard tidak berhasil menanggulangi pelanggaran Sultan Sepuh.<sup>13)</sup>

Crawfrut segera melaporkan kejadian-kejadian di Yogyakarta kepada Rafles. Dengan adanya laporan itu Rafles ingin datang sendiri di Yogyakarta untuk mengadakan perhitungan dengan Sultan Sepuh atau pelanggaran yang dilakukannya. Sebelumnya dia menemui Natakusuma agar mau menjadi utusan Inggris datang ke Yogyakarta untuk membujuk Sultan Sepuh agar mau menyerahkan tahtanya kembali kepada Sultan Raja, dan supaya Sultan Sepuh meminta maaf kepada Gubernur Inggris, beserta kesalahannya membunuh Patih Danurejo II.

Misi Natakusuma berhasil, dan Sultan berjanji akan memenuhi tuntutan yang diajukan oleh Rafles, setelah itu Natakusuma bersama Natadiningrat dikembalikan ke Yogyakarta.

Setelah Natakusuma berhasil melunakkan hati Sultan Sepuh tetap diakui sebagai raja dan Sultan Hamengku Buwana III diturunkan menjadi putra Mahkota, dengan syarat Sultan Hamengku Buwana II tidak akan melanggar lagi peraturan yang telah ada.

---

<sup>13</sup> Dr. Soekanto, Op.Cit., hlm : 88

Natakusuma dan Natadiningrat yang diharapkan oleh Sultan dapat diajak kerjasama, ternyata kini telah berubah memihak penjajah Inggris.

Pemerintahan yang kedua dari Sultan Hamengku Buwana II hanya berlangsung selama satu tahun, sebab Sultan pun tidak luput dari bentrokan Inggris. Dalam penyidikan terbukti bahwa Sultan bekerja sama dengan sunan di Surakarta hendak mengadakan perlawanan terhadap Inggris.

Atas dasar itu, Rafles mengirimkan bala tentara untuk menyerang Yogyakarta. Pada pertempuran ini Natakusuma dan Natadiningrat memihak kepada Inggris. Keadaan Sultan sangat terjepit, sehingga bersama pasukannya yang masih setia tidak mampu menghadapi tentara Inggris. Setelah peperangan berakhir, Sultan Sepuh dibuang ke pulau Pinang bersama puteranya, Mangkudingrat. Sultan Raja diangkat menjadi raja kembali. Hukum lain yang ditimpakan kepada kerajaan Yogyakarta dan Surakarta adalah penyerahan daerah Kedu, sebagai Semarang, Rembang dan Surabaya. Di samping itu juga diharuskan menyerahkan hutan-hutan jati, sarang burung, pasar, dan rumah cukai kepada Inggris. Kedua Kerajaan itu diharuskan pula mengakui kekuasaan tertinggi orang-orang Eropa atas pulau Jawa. 14)

Ketentuan-ketentuan di atas, membawa kerugian

<sup>14</sup> Bambang Suwondo, Sejarah Daerah Istimewa Yogyakarta, Pusat Penelitian Sejarah dan Kebudayaan Daerah, Jakarta, 1976  
hlm. 112

yang sangat besar, karena tempat-tempat tersebut merupakan kejayaan negara yang sangat bernilai. Rakyat juga tidak dapat menikmati hasilnya karena telah menjadi milik bangsa asing, mereka yang membutuhkan kayu-kayu jati harus menebus dengan harga yang sangat tinggi.

Tidak lama dari kejadian itu, Inggris mengangkat Pangeran Natakusuma sebagai Pangeran merdeka sebagai hadiah atas jasa-jasanya dalam membantu Inggris. Diberi gelar Kg. Gusti Pangeran Adipati Pakualam I, dan pemerintahannya disebut Pakualaman. Peristiwa itu terjadi pada tahun 1813,<sup>15)</sup> Pakualam I selalu diberi wewenang menjalankan pemerintahan di daerah yang telah ditentukan juga diberi tugas mendampingi Sri Sultan Hamengku Buwana IV, pengganti Sultan Raja, karena Sultan masih remaja.

Setelah Sultan Hamengku Buwana IV meninggal dunia Pangeran Menol dinobatkan menjadi Raja dengan gelar Sultan Hamengku Buwana V. Waktu itu baru berumur tiga tahun. Sebagai wakilnya dalam menjalankan pemerintahan oleh Belanda bentuklah dewan perwalian, yang anggotanya terdiri dari : Kanjeng Ratu Ageng ( nenek Sultan ), Kanjeng Ratu Kencana ( ibunda Sultan), Pangeran Mangkubumi ( putra Sultan Sepuh), dan Pangeran Diponegoro. 16)

---

<sup>15</sup> Panitia Peringatan Yogyakarta 200 tahun, Yogyakarta 200 Tahun, hlm : 24

<sup>16</sup> Sagimun M.D., Op.Cit., hlm : 43

Pengangkatan dewan wali itu sifatnya formalitas saja, sebab kenyataannya pendapat mereka tidak pernah di perhitungkan oleh Belanda. Belanda hanya mempertimbangkan pendapat-pendapat kerajaan yang bisa diajak kerjasama dengan mereka, contohnya Danurejo II.

Pada awal abad ke 19, pengaruh Belanda bertambah kuat. Pada masa Dandels ada usaha-usaha untuk mencampuri sedemikian jauh tatacara dan adat istiadat di dalam istana khususnya di kerajaan Yogyakarta. Dandels menuntut persamaan derajat dengan Sultan dalam upacara kunjungan resmi, seperti penghapusan keharusan menyajikan sirih oleh Sultan bagi pembesar Belanda duduk sejajar dengan raja. Tindakan Dandels ini menimbulkan kekhawatiran terhadap sementara golongan bangsawan dalam istana. Golongan ini memandang gejala tersebut di atas sebagai tanda kemerosotan martabat kerajaan, dalam hal itu Raffles juga meneruskan garis kebijaksanaan Dandels tersebut di atas.<sup>17)</sup>

Dengan melihat kebijaksanaan-kebijaksanaan Belanda tersebut di atas, maka jelaslah bahwa disatu sisi wilayah dan kekuasaan Mataram makin sempit, sementara pemerintahan Hindia-Belanda semakin leluasa memasuki daerah kekuasaan Mataram.

Dengan demikian jelaslah, bahwa keikut campurnya

---

<sup>17</sup> Marwati Djoened Poepongoro, Sejarah Nasional Indonesia IV, Departemen P dan K : PT. Balai Pustaka, Jakarta, 1984, hlm. 188

Belanda dalam hal kerajaan Mataram, membawa pengaruh yang besar terhadap kerajaan Mataram, kekuasaan Mataram sedikit demi sedikit berkurang.

### B. Situasi Ekonomi

Campur tangan Belanda terhadap kerajaan Mataram dalam bidang politik, seperti yang telah disinggung di atas tentunya mempunyai dampak atau pengaruh besar terhadap keadaan ekonomi rakyatnya. Hal itu terjadi mulai masa pemerintahan Amangkurat I.

Salah satu di antara campur tangan politik yang bisa berpengaruh terhadap ekonomi adalah hubungan antara pihak Mataram dengan V.O.C yang sangat erat itu belum pernah terjadi sebelumnya.<sup>18)</sup> Hal itu merupakan hubungan yang tidak dialami pada masa-masa sebelumnya.

Langkah-langkah tersebut membawa dampak negatif bagi perekonomian saat itu. Dengan adanya penghapusan uang pantai berarti mengurangi pemasukan kerajaan, ditambah membayar ganti rugi ekspedisi kepada Belanda, menambah pengeluaran negara.

Selanjutnya di bidang ekonomi ini Inggris menetapkan peraturan baru yang berdasarkan tiga asas. Pertama, segala bentuk penyerahan wajib dan kerja rodi dihapuskan. Kedua, peran para bupati sebagai pemungut pajak dihapuskan dan sebagai penggantinya mereka dija-

---

<sup>18</sup>  
H.J. De'Graaf, Disintegrasi Mataram, Jakarta, Grafiti 1987, hlm : 90

dikan bagian yang integral dari pemerintahan kolonial dengan fungsi-fungsi pemerintahan sesuai dengan azas - azas pemerintahan di negara barat. Ketiga, berdasarkan anggapan bahwa pemerintah kolonial adalah pemilik tanah, sedang para petani dianggap sebagai penyewa, maka mereka diwajibkan membayar sewa tanah.<sup>19)</sup>

Walaupun penyerahan wajib dihapuskan dan diganti dengan sewa tanah, tetap saja membebani rakyat, mereka harus membayar sewa yang tinggi, sedangkan penghasilan belum tentu baik.

Setelah kekuasaan Inggris di Indonesia jatuh ketangan Belanda, sistem sewa tanah itu tetap diberlakukan oleh Belanda sampai 1830.<sup>20)</sup>

Pada tahun 1830 pemerintah Belanda telah mengangkat Gubernur Jenderal yang baru untuk Indonesia, Johannes Van den Bosch, dia ditugaskan untuk meningkatkan produksi eksport yang tidak terjadi selama sistem sewa tanah berlangsung.<sup>21)</sup>

Pemimpin baru itu segera merubah sistem sewa tanah yang berlaku, kemudian menghidupkan kembali sistem tanam paksa dalam bentuk yang lebih ekstrim dan keras. Dia menganggap bahwa sistem sewa tanah tidak dapat meningkatkan produksi eksport, sehingga kurang

<sup>19</sup> Sartono Kartodirjo, Sejarah Nasional Indonesia VI, jld. IV, PT.Grafitas, Jakarta, 1975, hlm. 58-59.

<sup>20</sup> Ibid. hlm. 65

<sup>21</sup> \_\_\_\_\_, Sejarah Nasional Indonesia IV, hlm. 66

menguntungkan bagi pemasukan keuangan kolonial.

Keadaan ekonomi para petani yang semakin memburuk itu dipergunakan oleh golongan bangsawan yang merasa terhina ini untuk memproklamasikan perang jihad melawan Belanda dalam tahun 1825 yang dipimpin oleh Diponegoro.

Perang Diponegoro mengakibatkan krisis ekonomi yang sangat parah di pulau Jawa, dan juga krisis keuangan kolonial. Untuk mengatasinya pemerintah melancarkan Cultur Stelsel (sistem Tanam paksa) terhadap para petani. Dengan sistem ini para petani dibebaskan dari pajak tanah yang wajib mereka bayar sejak zaman Raffles, tetapi sebagai gantinya mereka wajib menanam tanaman yang tertentu untuk ekspor, yang sudah ditetapkan oleh pemerintahan Belanda.<sup>22)</sup>

Para petani diwajibkan menyediakan sebagian tanah mereka untuk kepentingan tanaman yang diinginkan kolonial. Untuk mengerjakannya, Belanda mengerahkan tenaga rakyat secara paksa tanpa upah. Sedang tanah yang dipakai untuk tanaman ekspor itu hanya dapat ganti rugi yang sangat kecil sekali nilainya.

Pada masa sistem tanam paksa ini, kehidupan rakyat semakin memprihatinkan. Tanah yang mereka garap untuk kepentingan bahan makanan keluarga mereka,

---

<sup>22</sup> Koentjoroningrat, Kebudayaan Jawa, PT. Balai Pustaka, Jakarta, 1984, hlm. 67.



hasilnya sangat berkurang, sebab tenaga mereka banyak yang digunakan untuk tanaman ekspor milik Belanda.

Akibat ekonomi yang menyebabkan rakyat Mataram menjadi miskin adalah adanya peraturan Van der Capellen yang menetapkan bahwa semua penyewa tanah oleh penguasa Eropa, dari penguasa dan bangsawan pribumi di Surakarta dan Yogyakarta dibatalkan, dengan syarat mengembalikan uang sewa atau pembayaran lain yang dilakukan. Akibat peraturan yang dikeluarkan oleh Van der Capellen ini pada tahun 1823, banyak kaum ningrat mengalami kesulitan besar terutama kesulitan-kesulitan yang ada kaitannya dengan ekonomi.<sup>23)</sup>

Dengan demikian dapat disimpulkan, bahwa adanya penguasaan Belanda terhadap kerajaan Mataram, terutama dalam bidang ekonomi, menyebabkan adanya kemiskinan, kemelaratan dan ketidakadilan yang nantinya bisa berakibat fatal bagi penjajah Belanda, yakni adanya pemberontakan Pangeran Diponegoro.

### C. Situasi Sosial dan Budaya

Sebagaimana telah disebutkan di atas, bahwa berdirinya kerajaan Yogyakarta merupakan hasil pembagian kerajaan Mataram dalam perjanjian Gianti. Pembagian wilayah itu bersifat acak atau tidak teratur, sehingga pada awal berdirinya kerajaan Yogyakarta se-

<sup>23</sup> Drs. G. Moedjanto, MA., Kesultanan Yogyakarta dan Kadipaten Pakualaman, Kanisius, Yogyakarta, 1994, hlm. 18

ring terjadi kekacauan dalam masyarakat yang bertempat tinggal di daerah mancanegara. Hal itu dikarenakan batas-batas antara wilayah Sunan dengan wilayah Sultan tidak begitu jelas.

Disamping itu, baik kerajaan Surakarta maupun Yogyakarta harus menghadapi pemberontakan Raden Mas Said yang tidak mau diajak kompromi dalam perjanjian Gianti.

Setelah pemberontakan itu dapat diatasi, mulailah dilaksanakan pembangunan ibukota kerajaan. Kekacauan yang terjadi di daerah-daerah mancanegara itu segera dapat diatasi, setelah pembangunan istana selesai. Sultan dapat memperhatikan kepentingan masyarakat secara luas, termasuk batas-batas wilayah Sultan dan Sunan segera diselesaikan, agar keamanan dan ketenteraman dapat dijaga.

Pada masa Hamengku Buwana I, keadaan aman tentram, kehidupan rakyat mengalami kemakmuran dengan hasil pertanian yang melimpah. Sultan mempunyai kewibawaan yang besar di mata rakyat, para pejabat, maupun di mata Belanda.

Begitu pula hubungan Sultan dengan rakyat terjalin dengan baik. Dia berpendapat, bahwa hanya dengan persatuan Raja dengan rakyat saja dapat menjaga keselamatan negara. Ternyata pernyataan seperti itu memang dapat dijadikan pedoman untuk mencapai kemaju-

an suatu pemerintahan. Kita dapat membayangkan, apa yang akan terjadi jika pemimpin sudah tidak lagi mem-perdulikan kepentingan rakyatnya. Kekacauan dan kehan-curanlah yang bakal terjadi, sebab rakyat sudah tidak lagi menyenagi pemimpinnya.

Sepeninggal Sultan Hamengku Buwana I, ketantra-man dan kemakmuran seluruh lapisan masyarakat, ber-angsur-angsur berubah menjadi kemiskinan dan penderi-taan. Belanda berhasil menguasai bidang perdagangan maupun pemerintahan.

Kegagalan Sultan Hamengku Buwana II dalam mengadakan perlawanan terhadap Belanda, memaksanya un-tuk mengakui kekuasaan Belanda atas kerajaan Yogyakarta. Pengangkatan pejabat tinggi di lingkungan keraton sampai dengan pejabat-pejabat yang ada di daerah-dae-rah mancanegara adalah wewenang kolonial. Kebanyakan mereka adalah kaki tangan Belanda yang bekerja sama dengan Belanda membantu program kolonial, dengan imbalan kesejahteraan keluarga mereka terjamin.

Apabila diantara pejabat-pejabat itu ada yang ketahuan tidak mendukung keinginan penjajah, segera saja dipecat dan diganti orang-orang kepercayaan mereka. Sultan hanya diperalat untuk mengambil hati rakyat agar mau melaksanakan segala ketentuan yang sebenarnya dibuat oleh kolonial.

Pada masa penjajahan Inggris, keadaan di atas

tetap saja berlanjut. Setelah kekuasaan jatuh lagi ketangan Belanda dengan Gubernur Jenderal yang baru, penderitaan rakyat semakin berat dengan segala peraturan baru yang semakin membebani mereka.

Masyarakat mempunyai kepercayaan bahwa setiap perkataan dari Sultannya, bukan semata-mata perkataan dari manusia biasa yang kebetulan mempunyai kekuasaan, tetapi juga merupakan kata sakti yang didukung kekuatan-kekuatan magic segenap pusaka kerajaan.<sup>24)</sup>

Mereka beranggapan bahwa setiap kata Sultan merupakan hukum yang harus ditaati, dan kalau tidak akan menimbulkan balak atau bencana.

Kepercayaan tentang kekuatan pada setiap titah Sultan itu, dipergunakan sebaik-baiknya oleh kolonial untuk memperoleh keuntungan yang sebanyak - banyaknya sesuai dengan misi penjajahan mereka. Dengan memper - alat Sultan agar mau mengemukakan kehendak - kehendak kolonial kepada rakyat atas nama Sultan, penjajah bisa memperoleh apa yang mereka inginkan. Tentu saja Sultan beserta para pejabat lainnya tidak dapat menolaknya, karena mereka tidak mempunyai kuasa apa-apa dalam menentukan kebijaksanaan pemerintahan. Dengan demikian rakyat menganggap bahwa semua yang dibebankan kepada mereka adalah atas kehendak rajanya.

---

<sup>24</sup> Selo Soemardjan, Perubahan Sosial Di Yogyakarta, PT Gajah Mada University, Press, Yogyakarta, 1990, hlm :25

Oleh karena itu mereka harus mentaatinya sebagai tanda pengabdian mereka kepada raja. Mereka yang mengetahui keadaan mereka yang sebenarnya hanya sebagian kecil saja, namun mereka yang tahu itupun tidak dapat berbuat apa-apa. Itulah salah satu sebab keberhasilan penjajah menguasai kerajaan di Jawa.

Pada garis besarnya, masyarakat Yogyakarta terbagi atas dua bagian ( kelas ) yaitu kelas bangsawan atau priyayi dan " Wong Cilik " atau rakyat biasa.<sup>25)</sup> Kelompok priyayi terdiri dari keluarga raja dan orang-orang yang masih mempunyai darah bangsawan, serta pejabat-pejabat pemerintahan lainnya. Sedang kelompok rakyat biasa terdiri dari kaum tani, pedagang, dan karyawan perusahaan swasta dan perdagangan.

Pada masa ini, kehidupan masyarakat dari golongan priyayi dan golongan rakyat biasa sangat terpisahkan. Rakyat biasa hanya tahu bahwa mereka harus selalu siap menerima perintah dari atasan, walaupun itu sangat membebani mereka. Kelompok priyayi pada umumnya bersikap semena-mena terhadap kelompok rakyat biasa. Dalam urusan pemerintahan, kelompok kedua tidak tahu menahu.

Begitu pula di bidang pendidikan, nampak sekali perbedaannya. Untuk kalangan bangsawan, di lingkungan keraton di sediakan sebuah sekolah yang disebut se-

---

<sup>25</sup>

Ibid, hlm : 27

kolahan tamanan, didirikan tahun 1757.<sup>26)</sup>

Bagi masyarakat biasa tidak ada sekolah seperti tersebut di atas. Mereka memperoleh pendidikan dari lingkungannya sendiri, yang umumnya hanya terbatas pada petuah-petuah dari orang tua mereka. Paling pokok dalam pendidikan keluarga itu berkisar pada masalah budi pekerti.

Pada gadis remaja diberi pelajaran yang berupa persiapan-persiapan dalam berumah tangga nanti, sebab ibu adalah yang paling banyak bergaul dengan anak-anaknya, dan tingkah lakunya menjadi panutan bagi sang anak.

Untuk anak laki-laki diberi pelajaran tentang tata krama atau sopan santun sebagai persiapan kalau nanti menjadi abdi di lingkungan keraton. Pekerjaan yang paling mulia dalam pandangan kelompok rakyat biasa adalah jika mereka dapat menjadi abdi raja dan keturunannya.

Kesenian pada waktu itu perkembangannya masih terbatas pada lingkungan kerajaan. Bersama dengan berdirinya Kerajaan Yogyakarta, dibawa pula para ahli kesenian ke Yogyakarta. Kesenian yang ada merupakan kelanjutan dari karya-karya seni yang ada pada masa kerajaan Mataram sebelum terbagi.

---

<sup>26)</sup> Panitya, Peringatan 200 tahun kota Yogyakarta, Kota Yogyakarta 200 tahun, hlm. 65.

Seni merupakan wujud dari budaya masyarakat yang hidup di kerajaan Yogyakarta khususnya atau kebudayaan Jawa pada umumnya, dapat di sebut kepahlawanan. Hal itu di sebabkan kebudayaan sangat dipengaruhi oleh cita-cita kepahlawanan atau cita-cita kekesatriaan. Kebudayaan itu sangat menunjang tinggi bentuk hidup kebangsawanan, yang bersumber karya sastra klasik Jawa dan wayang.<sup>27)</sup>

Karya sastra klasik Jawa dan wayang itu dapat dipandang sebagai ensklopedi nilai-nilai hidup kuno, yang memberikan pegangan hidup, pandangan dunia dan pandangan hidup kepada orang Jawa. Karena pemberian atau pelajaran itu maka orang Jawa dapat terbantu dalam pembenyukan sifat serta peradaban batin dan memperoleh kecakapan untuk mengetahui kabaikan maupun kejahatan hati orang.<sup>28)</sup>

Untuk mewujudkan semua itu, sepindahnya Sri Sultan Hamengku Buwana I dari pasanggrahan gunung Tlaga Ngambar Ketawang ( Gamping ) ke keraton Yogyakarta yang telah selesai dibangun pada tahun 1757, maka dimulailah dengan mengisi prabot kewibawaan keraton

---

<sup>27</sup> Dep.P dan K, Pusat Penelitian Sejarah Dan Kebudayaan, Sejarah Daerah Istimewa Yogyakarta, Proyek Penelitian dan Pencatatan Kebudayaan Daerah , 1977, hlm.141

<sup>28</sup> Ibid

seperti gamelan-gamelan, tari-tarian, wayang dan sebagainya seimbang dengan keraton Surakarta.<sup>29)</sup> Kesenian itu disediakan untuk pesta-pesta dalam kerajaan, upacara-upacara, maupun untuk menyambut para kerajaan.

#### D. Situasi Keagamaan

Kedatangan Belanda ke daerah-daerah Mataram, yang berlanjut dengan campur tangan Belanda dalam masalah politik dan ekonomi, tentunya membawa pengaruh terhadap budaya keagamaan masyarakat yang di tempati. Dari segi ini sudah jelas sekali perbedaannya antara orang Belanda ( orang-orang kristen ) dengan penduduk pribumi ( Islam ) sehingga hambatan terhadap keberadaan Islam sangat dirasakan.

Dalam segi keagamaan ini, banyak kalangan ningrat yang merasa prihatin melihat pola tingkah laku orang-orang Belanda baik ketika mereka berada di kerajaan maupun di luar Keraton. Lebih-lebih para Ulama' berkesimpulan, bahwa orang-orang bukan hanya menghina agama, akan tetapi juga mau mengkafirkan penduduk pribumi. Sebab pada masa itu para pembesar kerajaan dan para pemuda sudah mulai ikut dalam budaya Belanda.

Perbedaan nilai-nilai yang timbul karena tata cara kehidupan Keraton Jawa sekaligus yang beragama Islam mengakibatkan disamping ketidak senangan kepada penjajah yang kafir, juga kebencian yang ditimbulkan

---

<sup>29</sup> Panitia peringatan Kota Yogyakarta, Op.Cit., hlm. 121



oleh adanya kesadaran tentang perbedaan sumber nilai atau norma, dalam hal ini adalah agama Kristen.

Perbedaan-perbedaan antara agama Kristen dan agama Islam inilah yang nantinya berakibat timbulnya berbagai keresahan terutama kebencian Pangeran Diponegoro, Ulama' dan masyarakat yang lainnya terhadap orang-orang kafir Belanda. Sehingga puncak dari kebencian dan keresahan ini berakibat timbulnya sebuah pemberontakan dan jihad membela agama.

Meskipun situasi keagamaan begitu mengkhawatirkan seperti halnya di atas, pada abad ke 19 secara kuantitas masyarakat Yogyakarta tercatat seluruhnya beragama Islam.<sup>30)</sup> Sebagaimana kebiasaan masyarakat Jawa khususnya, dan masyarakat banyak pada umumnya di Kerajaan-kerajaan pada zaman dahulu. Masih berlaku pula teori yang mengatakan agama rakyat mengikuti agama rajanya.<sup>31)</sup>

Ketika Jawa dikuasai oleh kerajaan Hindu, rakyat juga memeluk agama Hindu dengan masih menampilkan kejawaannya. Kebetulan agama nenek moyang sebelum agama itu datang, tidak banyak berlawanan dengan kepercayaan agama yang baru datang itu. Begitu pula ketika Islam berhasil menguasai kerajaan-kerajaan di Jawa dan berkembang menguasai kerajaan Islam yang

<sup>30</sup> Ibid. hlm. 144.

<sup>31</sup> Ibnu Khaldun, Muqaddimah, Ahmadi Thoha, Pustaka Firdaus, Jakarta, 1986, hlm.178.

besar, maka dengan serta merta rakyat menyatakan diri sebagai pemeluk agama Islam mengikuti jejak raja mereka.

Terdapat kesan kuat bahwa Islam di Indonesia, pada awalnya merupakan gejala kota yang juga merupakan pusat kegiatan dagang dan komersial. Pemeluk-pemeluk pertamanya adalah golongan dagang suatu masyarakat yang ketika itu, menempati posisi kelas sosial cukup baik. Dalam penyebarannya kemudian, Islam dipeluk oleh masyarakat kota, baik dari lapisan atas maupun bawah.<sup>32)</sup>

Walaupun kerajaan-kerajaan di Jawa secara resmi memeluk agama Islam, namun dalam gaya kehidupannya berpengaruh tradisi Hindu-Jawa lebih menonjol.<sup>33)</sup> Keraton-keraton itu menjadi pusat kebudayaan Jawa klasik dengan tari-tarian, pertunjukkan wayang, beserta gamelannya, dan dengan suatu ritual keagamaan yang memang diadakan pada perayaan hari besar Islam. Seperti terlihat perayaan hari Maulid Nabi S. A. W., yang disebut dengan perayaan Sekaten.<sup>34)</sup> Meskipun

---

<sup>32</sup> Fachry Ali, Bahtiar Effendi, Merambah Jalan Baru Islam, PT. Mizan, Bandung, 1986. hlm. 31.

<sup>33</sup> Franz Magniz Suseno, Etika Jawa, Sebuah Analisa Falsafah tentang Kebijakan dan Hidup Jawa, PT. Gramedia, Jakarta, 1993, hlm. 34.

<sup>34</sup> Koentjaraningrat, Op.Cit., hlm. 367.

perayaan itu diadakan pada hari besar Islam, namun rangkaian acaranya lebih menekankan pada upacara-upacara itu, lengkap dengan sesaji yang sebenarnya tidak ada dalam ajaran Islam, akan tetapi berasal dari kepercayaan nenek moyang. Juga kepercayaan terhadap kekuatan benda-benda pusaka yang menurut mereka menambah kekuatan para raja dan bagi siapa saja yang memilikinya, tetap saja melekat sebagai suatu kesatuan yang seakan-akan sudah tidak dapat di pisahkan.

Islam pada waktu itu mengalami banyak kekaburan, mencampur-adukkan ajaran Islam dengan kepercayaan masyarakat setempat sulit untuk dihindarkan. Di satu sisi mereka tetap menggenggam mitos-mitos tersebut, di sisi lain mereka telah menyatakan diri sebagai pemeluk agama Islam dengan segala ajaran-ajarannya, yang sebagian besar masih asing bagi mereka.

Para wali atau Ulama' yang menyebarkan agama Islam di Jawa, berusaha mengombinasikan ajaran Islam dengan kebudayaan setempat. Sedikit demi sedikit mereka mengarahkan kepercayaan yang telah ada ke arah dan ajaran Islam. Misalnya saja dalam kesenian wayang, Sunan Kalijogo memasukkan falsafah-falsafah Islam pada setiap jalan cerita dengan tetap menggunakan tokoh pewayangan tersebut dengan nama tokoh-tokoh yang telah ada pada ajaran-ajaran Hindu-Jawa. Dan juga pada acara slametan bagi orang yang telah meninggal dunia

pada hari ketiga, ketujuh, keempat puluh, dan keseratus si mati meninggal. Pada peringatan tahun pertama dan kedua dan hari keseribu.<sup>35)</sup> Yang pada mulanya dilakukannya dengan bacaan mantera-mantera dan sesaji-sesaji, maka kegiatan tersebut tetap diberlakukan dengan mengubah acara kegiatan dengan do'a-do'a sesuai dengan ajaran Islam, serta ceramah-ceramah keagamaan

Para wali dan generasi penerusnya juga mempelajari hal-hal yang bersifat mistik guna melengkapi ilmu mereka. Hal itu semakin memperkuat keyakinan masyarakat memeluk agama baru itu.

Pada garis besarnya, kehidupan keagamaan pada masyarakat Jawa, dibagi menjadi dua golongan yaitu: golongan santri mutihan (selanjutnya di sebut dengan kaum santri)<sup>36)</sup> dan golongan abangan.

Termasuk ke dalam golongan kaum santri adalah mereka yang sudah mau melaksanakan beberapa ajaran Islam terutama sholat lima waktu, puasa dan mengaji. Sedangkan yang tidak rutin dalam melaksanakan kewajiban itu termasuk ke dalam golongan kaum abangan.

Keadaan kaum santri pada saat itu sangat jauh berbeda jika dibandingkan dengan umat Islam sekarang. Sebagian dari mereka, walaupun telah melaksanakan ke-

<sup>35</sup> Clifford Geertz, Abangan, Santri, Priyayi Dalam Masyarakat Jawa, Pustaka Jaya, Jakarta, 1989, hlm . 96

<sup>36</sup> Panitia Peringatan kota Yogyakarta, 200 tahun, Kota Yogyakarta 200 tahun, hlm . 57

wajiban-kewajiban, namun kehidupan mereka masih diwarnai ajaran yang bukan berasal dari Islam. Misalnya kepercayaan terhadap kesaktian benda-benda pusaka serta tempat-tempat yang di anggap keramat.

Kepercayaan-kepercayaan di atas, tertama sekali masih melekat pada kehidupan masyarakat yang ada di lingkungan keraton, maupun daerah-daerah yang jauh dari pengaruh daerah pesisir utara. Lain halnya dengan mereka yang hidupnya dekat dengan pesisir utara, pengaruh kepercayaan Hindu-Jawa prosentasinya sangat kecil. Ajaran-ajaran mistik yang mereka pelajari juga sangat berlainan dengan yang dipelajari masyarakat pedalaman.

Kaum santri mempelajari ilmu-ilmu mistik yang dibawa oleh para wali, dan tidak bertentangan dengan ajaran Islam atau sering di sebut dengan ajaran thoriqot. Masyarakat yang ada dipedalaman, biasanya juga mempelajari ilmu-ilmu mistik, namun jalannya bertentangan dengan ajaran Islam.

Lain halnya dengan umat Islam sekarang. Saat ini telah banyak bermunculan pemuka agama Islam yang ingin mengembalikan ajaran Islam sesuai dengan apa yang ada dalam Al-Qur'an dan Hadits, serta sumber-sumber lainnya yang keabsahannya dapat dipertanggungjawabkan, sedikit demi sedikit pengaruh kepercayaan Hindu-Jawa dapat di kurangi bahkan sebagian ada yang telah meninggalkan

nya sama sekali baik yang berbentuk kegiatan maupun rangkaian acaranya.

Jika kaum santri sudah melaksanakan kewajiban-kewajiban agama, maka kaum abangan lebih banyak tidak memperdulikan ajaran-ajaran tersebut. Mereka mengakui Islam sebagai agamanya, namun gaya kehidupan mereka tetap mengikuti ajaran-ajaran kepercayaan yang telah ada sebelumnya. Untuk mensucikan jiwa mereka lebih senang menjalankannya dengan bersemedi ketimbang mendekatkan diri kepada Allah lewat sholat dan dzikir sesuai dengan tuntunan-tuntunan Islam. Golongan kaum abangan ini lebih didominasi oleh masyarakat yang ada di daerah pedalaman dan belum banyak berhubungan dengan kaum santri di pesisir utara. Upacara selamatan dengan berbagai sesajinya merupakan ciri yang sangat menonjol dalam gaya hidup kaum abangan, sebagai persembahan terhadap roh nenek moyang agar terhindar dari kemurkaan roh-roh tersebut.

Pada umumnya pendidikan agama diajarkan di pondok langgar-langgar dengan sistim pendidikan yang masih sangat sederhana. Pelajaran yang diberikan antara lain : membaca Al-Qur'an, amal ma'ruf nahi mungkar, hukum batal, haram, najis, makruh dan sebagainya. Guru yang memberi pelajaran pada umumnya adalah seorang orang lebai ( kaum ) yang ada di kampung tertentu.

<sup>37</sup> Panitia Peringatan kota Yogyakarta 200 tahun, Kota Yogyakarta 200 tahun, hlm .37

Di daerah-daerah pesisir utara telah ada beberapa kiai yang menerima murid dari dalam maupun dari luar daerah. Selain mempelajari ilmu agama, mereka juga di beri pelajaran ilmu bela diri dan ilmu kebatinan.

Di lingkungan keraton juga ada guru yang khusus menganjar agama Islam untuk kerabat keraton, yang di sebut kiai Penghulu.<sup>38)</sup>

Dari keseluruhan umat Islam di wilayah kerajaan Yogyakarta pada saat itu, masih sangat sedikit sekali yang benar-benar memahami kandungan ajaran Islam. Mereka yang mengetahui bahwa Islam adalah agama yang dipeluk oleh raja mereka, sehingga harus diikuti, tanpa mengetahui apa dan bagaimana Islam itu sebenarnya.

---

<sup>38</sup> Ibid,..hlm. 65